

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat dan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang disusun dan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan dana yang telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan

akuntabilitas atas pengelolaan anggaran. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dan pemanfaatan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, maupun sosial dengan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang;
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang;
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2016;
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

### **BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 3.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan OPD

Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan LRA

3.1.2 Belanja

Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

3.1.3 Pendapatan LO

3.1.4 Beban

Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Penjelasan Pos-pos Neraca

3.1.5 Aset

3.1.6 Kewajiban

3.1.7 Ekuitas Dana

### **BAB IV. PENUTUP**

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merencanakan belanja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA setelah perubahan) sebesar **Rp. 4.027.568.323.000,-** yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.118.010.000,00,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.909.558.323,00,-**. Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan pada tahun 2017 adalah sebesar **84,09%**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	2,118,010,000	1,893,119,295	89.38%
2	Belanja Langsung	1,909,558,323	1,493,533,516	78.21%
<b>JUMLAH</b>		<b>4,027,568,323</b>	<b>3,386,652,811</b>	<b>84.09%</b>

Sedangkan untuk penjabaran dari realisasi belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Belanja Tidak Langsung**

No	Uraian	2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji Pokok	1,162,700,000	1,105,067,400	95.04%
2	Tunjangan Keluarga	82,615,000	71,507,424	86.56%
3	Tunjangan Jabatatan	124,345,000	117,010,000	94.10%
4	Tunjangan Fungsional Umum	35,977,500	28,880,000	80.3%
5	Tunjangan Beras	61,500,000	49,100,760	79.84%
6	Tunjangan Pph	7,162,500	4,863,918	67.91%
7	Pembulatan gaji	250,000	13,673	5.47%
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	617,000,000	490,668,960	79.52%
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	26,460,000	26,007,160	98.29%
<b>JUMLAH</b>		<b>2,118,010,000</b>	<b>1,893,119,295</b>	<b>89.38%</b>

## Belanja Langsung

No	Uraian	Pencapaian Target	2017		
			Anggaran	Realisasi	%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	3,800,000	2,759,000	72.61%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	79,200,000	53,970,867	68.15%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	1 Tahun	97,066,000	88,074,777	90.74%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	59,100,000	55,175,000	93.36%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	113,450,000	104,767,254	92.35%
6	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	45,704,000	43,884,000	96.02%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	48,400,000	43,021,800	88.89%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	7,000,000	6,998,250	99.98%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	21,100,000	11,396,500	54.01%
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	200,000,000	199,804,198	99.90%
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	102,290,000	99,866,000	97.63%
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	9,000,000	8,632,500	95.92%
13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	16,500,000	7,405,500	44.88%
14	Pensertifikatan tanah pemerintah daerah	1 sertifikat	3,290,323	1,500,000	45.59%
15	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	1 Tahun	25,000,000	18,000,000	72.00%
16	Penyusunan pelaporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Tahun	81,500	81,500	100.00%
17	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1 Tahun	81,500	81,500	100.00%
18	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 Tahun	81,500	81,500	100.00%
19	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Tahun	81,500	81,500	100.00%
20	Pemantauan pelaksanaan kebijakan kependudukan	1 Tahun	23,400,000	22,703,500	97.02%
21	Penyusunan kebijakan kependudukan	1 Tahun	26,800,000	19,904,800	74.27%
22	Monitoring, evaluasi, validasi dan pemutakhiran data kependudukan	1 Tahun	124,725,000	120,102,600	96.29%
23	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil	1 Tahun	186,290,000	164,832,470	88.48%
24	Percepatan Perekaman e-KTP dan Peristiwa penting lainnya pada momen tertentu	1 Tahun	37,645,000	25,176,900	66.88%

25	Sertifikasi System Manajemen Mutu Berstandar ISO 9001-2015	1 Tahun	109,475,000	94,460,300	86.28%
26	DAK Dana Pelayanan ADM Kependudukan	1 tahun	569,997,000	300,771,300	52.77%
<b>JUMLAH</b>			<b>1,909,558,323</b>	<b>1,493,533,516</b>	<b>78.21%</b>

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal. Pengertian masing-masing jenis belanja tersebut adalah :

- Belanja operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu priode (satu tahun anggaran).

Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Tahun 2017 dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Diatas / (dibawah)	
			Rp.	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>3,926,878,323</b>	<b>3,288,386,811</b>	<b>638,491,512</b>	<b>83.74%</b>
- Belanja Pegawai	2,118,010,000	1,893,119,295	224,890,705	89,38%
- Barang Jasa	1,808,868,323	1,395,267,516	413,600,807	77,13%
<b>Belanja Modal</b>	<b>100.690.000</b>	<b>98,266,000</b>	<b>2,424,000</b>	<b>97,59%</b>
- Tanah				
- Peralatan & Mesin	100,690,000	98,266,000	2.424.000	97.59%
- Gedung & Bangunan				
- Jalan Irigasi dan Jembatan				
- Aset tetap lainnya				
<b>JUMLAH</b>	<b>4,027,568,323</b>	<b>3,386,652,811</b>	<b>914,428,032</b>	<b>84,09%</b>

Realisasi dari seluruh komponen belanja berada di bawah jumlah yang dianggarkan. Dari dua komponen belanja yang ada yakni belanja operasi dan belanja modal, pengeluaran (realisasi) terbesar berada pada belanja operasi yaitu sebesar Rp. 3.288.386.811,- (83,78%) dari total rencana belanja sebesar Rp. 3,926,878,323,- dengan komponen terbesar pada belanja pegawai sebesar Rp. 1,893,119,295,- atau 57,56 % dari total belanja operasi. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp. 1,395,267,516,- atau 39,46 % dari total belanja operasi.

Realisasi Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 98,266,000,- (97,59%) dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 100,690,000,-.

Penyebab realisasi belanja berada dibawah jumlah yang dianggarkan antara lain dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang realisasi belanjanya tidak sampai 75% dari dana yang dianggarkan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat hanya terealisasi sebesar 72,61%
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik hanya terealisasi sebesar 68,15%
- Penyediaan makanan dan Minuman hanya teralisasi sebesar 54,01%
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor hanya teralisasi sebesar 44,88%
- Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah hanya terealisasi sebesar 45,59%
- Bimtek Implementasi Peraturan Peraturan Perundanga-Undangan hanya terealisasi sebesar 72%
- Penyusunan Kebijakan Kependudukan hanya terealisasi sebesar 74,27%
- Percepatan Perekanan e-KTP dan Peristiwa Lainnya pada Momen Tertentu hanya terealisasi sebesar 66,88%
- DAK dana Pelayanan ADM Kependudukan hanya terealisasi sebesar 52,77%

## **2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dapat diminimalisir sehingga tidak menjadi kendala yang cukup berarti dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2017 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**3.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan**

**3.1.1 Pendapatan LRA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengelola pendapatan sehingga jumlah pendapatan LRA tidak ada alias nihil

**3.1.2 Belanja**

**3.1.2.1 Belanja Operasi**

Realisasi belanja operasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3,288,386,811,- dengan rincian sebagai berikut :

**3.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai baik yang ada pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam Tahun Anggaran 2017. Jumlah realisasi dari anggaran belanja tersebut terinci atas :

No	Uraian	2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji Pokok	1,162,700,000	1,105,067,400	95.04%
2	Tunjangan Keluarga	82,615,000	71,507,424	86.56%
3	Tunjangan Jabatatan	124,345,000	117,010,000	94.10%
4	Tunjangan Fungsional Umum	35,977,500	28,880,000	80.3%
5	Tunjangan Beras	61,500,000	49,100,760	79.84%
6	Tunjangan Pph	7,162,500	4,863,918	67.91%
7	Pembulatan gaji	250,000	13,673	5.47%
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	617,000,000	490,668,960	79.52%
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	26,460,000	26,007,160	98.29%
<b>JUMLAH</b>		<b>2,118,010,000</b>	<b>1,893,119,295</b>	<b>89.38%</b>

**3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa dalam tahun anggaran 2017. Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas :

No	Uraian	2017		
		Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Bahan Habis Pakai</b>		<b>228,826,000</b>	<b>173,829,750</b>	<b>75.97</b>
	Alat Tulis Kantor	209,376,000	157,009,500	74.99
	Alat Listrik dan elektronik	7,000,000	6,998,250	99.98
	Perangko, Materai dan Benda Pos lain	3,300,000	2,610,000	79.09
	Peralatan kebersihan dan bahan Pembersih	5,450,000	5,362,000	98.39
	Dekorasi	3,700,000	1,850,000	50.00
<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>437,496,323</b>	<b>315,964,818</b>	<b>72.22</b>
	Telepon	58,800,000	40,850,059	69.47
	Air	3,000,000	1,308,800	43.63
	Listrik	17,400,000	11,812,008	67.89
	Paket/Pengiriman	500,000	149,000	29.80
	Sertifikasi	3,290,323	1,500,000	45.59
	Jasa Publikasi	27,750,000	18,500,000	66.67
	Jasa Non Pegawai	176,290,000	102,262,070	58.01
	Retribusi Kebersihan	600,000	600,000	100.00
	Upah Pegawai Harian	149,866,000	138,982,881	92.74
<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>		<b>54,600,000</b>	<b>47,897,150</b>	<b>87.72</b>
	Jasa Service	17,000,000	11,433,500	67.26
	Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	34,000,000	33,997,500	99.99
	Pajak Kendaraan Bermotor	3,600,000	2,466,150	68.50
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>108,096,000</b>	<b>76,997,100</b>	<b>71.23</b>
	Cetak	76,605,000	51,622,500	67.39
	Penggandaan	31,491,000	25,374,600	80.58
<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>100.00</b>
	Sewa ruang rapat/pertemuan	500,000	500,000	100.00
<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>117,750,000</b>	<b>81,359,800</b>	<b>69.10</b>
	Makanan dan Minuman rapat	115,650,000	79,724,800	68.94
	Makanan dan Minuman tamu	2,100,000	1,635,000	77.86
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>319,000,000</b>	<b>257,251,398</b>	<b>80.64</b>
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129,900,000	87,144,200	67.09
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	189,100,000	170,107,198	89.96
<b>Belanja Pemeliharaan</b>		<b>9,000,000</b>	<b>8,632,500</b>	<b>95.92</b>
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,000,000	8,632,500	95.92
<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>		<b>75,000,000</b>	<b>72,500,000</b>	<b>96.67</b>
	Jasa Konsultansi Penelitian	75,000,000	72,500,000	96.67
<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>		<b>25,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>72.00</b>
	Bimbingan Teknis	25,000,000	18,000,000	72.00
<b>Honorarium PNS</b>		<b>267,100,000</b>	<b>185,475,000</b>	<b>69.44</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200,650,000	129,350,000	64.47
	Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	7,350,000	950,000	12.93
	Honorarium Pengelola Keuangan	59,100,000	55,175,000	93.36
<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>166,500,000</b>	<b>156,860,000</b>	<b>94.21</b>
	Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,500,000	3,500,000	100.00
	Pengganti Transport Non PNS	146,000,000	143,985,000	98.62
	Honorarium Panitia Pelaksana Non PNS	17,000,000	9,375,000	55.15
<b>JUMLAH</b>		<b>1,808,868,323</b>	<b>1,395,267,516</b>	<b>77.13</b>

### 3.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan penjumlahan terhadap belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Jumlah belanja modal ini tanpa ditambah honor pejabat pengadaan. Tahun 2017 Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang hanya berupa Peralatan dan Mesin yang direncanakan sebesar Rp. 100.690.000,00- dan terealisasi sebesar Rp. 98.266.000,00,- atau sebesar 97,59%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan Alat Rumah Tangga	7,750,000	7,750,000	100.00%
2	Pengadaan Komputer	70,940,000	68,516,000	96.58%
3	Pengadaan Kursi Tamu	9,500,000	9,500,000	100.00%
4	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12,500,000	12,500,000	100.00%
<b>JUMLAH</b>		<b>100,690,000</b>	<b>98,266,000</b>	<b>97.59%</b>

### 3.1.3 Pendapatan LO

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang adalah salah satu OPD yang tidak mengelola pendapatan sehingga jumlah pendapatan LO tidak ada/nihil

### 3.1.4 Beban

#### 3.1.4.1 Beban Operasi

##### 3.1.4.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1,893,119,295.00,- dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2017
<b>Beban Pegawai</b>	<b>1,893,119,295.00</b>
<b>Beban Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1,376,443,175.00</b>
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,105,067,400.00
- Tunjangan Keluarga	71,507,424.00
- Tunjangan Jabatan	117,010,000.00
- Tunjangan Fungsional Umum	28,880,000.00
- Tunjangan Beras	49,100,760.00
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4,863,918.00
- Pembulatan Gaji	13,673.00
<b>Beban Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>516,676,120.00</b>
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	490,668,960.00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	26,007,160.00

#### 3.1.4.1.2 Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 187,773,650.00,- Beban persediaan tahun 2017 ini didapat dari jumlah pembelian persediaan di tahun 2017 ditambah dengan pembebanan persediaan tahun 2016 yang dipakai di tahun 2017 serta dikurangi persediaan akhir per 31 Desember 2017 hasil stock opname dengan rincian :

Jenis Persediaan	Pembelian	(+) Persediaan 2016 yang digunakan	(-) Persediaan Akhir	Total Beban
	257,599,750	260,368,350	330,224,450	187,773,650
ATK	157,009,500	31,665,500	128,090,500	60,574,500
Alat Listrik dan elektronik	6,998,250	6,390,000	9,942,300	3,445,950
Perangko/Meterai	2,610,000	-	498,000	2,112,000
Peralatan Kebersihan dan Bahan	5,362,000	1,704,100	2,582,500	4,483,600

Pembersih				
Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	33,997,500	21,252,000	4,215,000	51,034,500
Barang Cetak	51,662,500	199,366,750	184,866,150	66,123,100

#### 3.1.4.1.3 Beban Jasa

Jumlah beban jasa Tahun Anggaran 2017 dan 2016 ada;ah masing-masing sebesar Rp. **870,876,322.00,-** dan Rp. **697,246,223.00,-**. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

URAIAN	2017
Beban Jasa Kantor	75,662,321.00,-
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	13,899,650.00,-
Beban Penggandaan	25,374,600.00,-
Beban sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000.00,-
Beban Makanan dan Minuman	81,359,800.00,-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	18,000,000.00,-
Beban Jasa Konsultasi	72,500,000.00,-
Honorarium PNS	185,475,000.00,-
Beban Honorarium Non PNS	398,104,951.00,-
<b>TOTAL</b>	<b>870,876,322.00,-</b>

#### 3.1.4.1.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. **8,632,500.00,-** dan Rp. **4.141.200,00,-** Beban tersebut merupakan beban pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2017.

#### 3.1.4.1.4 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah Rp. **257.251.398,00,-** dan Rp.**151,990,136.00,-**. Beban tersebut merupakan beban atas perjalanan dinas dalam

daerah sebesar Rp. 87.144.200,00- dan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 170.107.198,00,-

#### 3.1.4.1.4 Beban Penyusutan Aset

Jumlah Beban Penyusutan untuk per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 173.029.338,04,- dan Rp. 215.131.566.61,- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Adapun jumlah Beban Penyusutan dan Amortasi untuk Tahun 2017 diperoleh sebagai berikut:

Uraian	2017
Beban Penyusutan Alat Angkutan	30.692.571,43
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	90.067.096,00
Beban Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi	20.270.000,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.515.870,36
Beban Penyusutan Aset Lainnya	6.483.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>173.029.338,00</b>

#### 3.1.5 Aset

Deskripsi	Tahun 2017	Tahun 2016
	(Rp.)	(Rp.)
<b>Aset</b>	<b>2,127,159,946.37</b>	<b>2,149.347.412.98</b>

Aset yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang terdiri dari :

##### 1. Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 330,224,450.00,- dan Rp. 260,368,350.00,-. Jumlah tersebut merupakan Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 yang terdiri dari :

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Alat Tulis Kantor	128,090,500.00	31,655,500.00
Alat Listrik dan Elektronik	9,972,300.00	6,390,000.00
Perangko, Materai	498,000.00	-
Peralatan dan Bahan Kebersihan	2,582,500.00	1,704,100.00
Bahan Bakar Minyak	4,215,000.00	21,252,000.00
Barang Cetakan	184,866,150.00	199,366,750.00
<b>Jumlah</b>	<b>330,224,450.00</b>	<b>260,368,350.00</b>

## 2. Tanah

Tanah merupakan asset tetap yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar **Rp.214.800.000,-** dan **Rp.214.800.000,-**. Tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan nilai tanah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017.

## 3. Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar **Rp.1.708.965.420,-** dan **Rp.1.524.149.420,-**. Terdapat kenaikan nilai peralatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

<b>Alat Angkutan</b>	
Saldo awal per 31 Des 2016	459,846,000
Mutasi Kurang (Penghapusan)	188,450,000
Mutasi Tambah (Pembelian)	275,000,000
Hasil saldo per 31 Desember 2017	<b>546,396,000</b>
<b>Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	
Saldo awal per 31 Des 2016	928,703,420
Mutasi Tambah	85,766,000
Hasil saldo per 31 Desember 2017	<b>1,014,469,420</b>
<b>Alat-Alat Studio dan Komunikasi</b>	
Saldo awal per 31 Des 2016	135,600,000
Mutasi Tambah	12,500,000
Hasil saldo per 31 Desember 2017	<b>148,100,000</b>

## 4. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah **Rp.1.275.793.518,-** dan **Rp.1.275.793.518,-**. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Gedung dan Bangunan</b>	
Saldo awal per 31 Des 2016	1,275,793,518
Mutasi Tambah	-
Hasil saldo per 31 Desember 2017	1,275,793,518

Pada tahun 2017 tidak ada penambahan nilai tambah pada belanja gedung dan bangunan karena tidak ada belanja rehab gedung dan bangunan serta belanja modal gedung dan bangunan

#### 5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah **Rp.10.687.252,-** dan **Rp.10.687.252,-**. Aset tetap lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berupa buku peraturan perundang-undangan dan buku lainnya. Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan terhadap nilai aset tetap lainnya.

#### 6. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah **(Rp.1.598.543.793.63)** dan **(Rp.1.318.526.827,02)**. Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan sampai dengan akhir 31 Desember 2017.

#### 7. Aset Lainnya

Nilai aset lainnya merupakan aset lain-lain pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah **Rp. 300.684.200,00,-** dan **Rp. 290.323.000,00,-**

#### 8. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nilai akumulasi penyusutan aset lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah **(Rp. 115.451.100,-)** dan **(Rp.108.247.300,-)**.

### 3.1.6 Kewajiban

Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada akhir tahun 2017 dan 2016 berupa Kewajiban Jangka Pendek masing-masing adalah sebesar **Rp. 1,097,906.00,-** dan **Rp. 2,005,452.00** berupa hutang listrik, air dan telepon dengan rincian :

<b>Hutang Barang dan Jasa</b>	
Rekening Listrik	878,136
Rekening Air	164,700
Rekening Telepon	55,070
Rekening Internet	
<b>Jumlah Hutang Barang dan Jasa</b>	<b>1,097,906</b>

### 3.1.7 Ekuitas

#### 1. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih dari selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp. 1,260,590770.63) dan (Rp. 1,451,414,019.02,-). Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 2. RK PPKD

Nilai RK PPKD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah Rp. 3,386,652,811.00,- dan Rp.3,598,755,980.00,- Nilai RK PPKD merupakan nilai SP2D dikurangi CP Gaji dan UYHD dengan rincian sebagai berikut:

<b>RK RKPPKD</b>	
Penerimaan SP2D	3,427,982,211.00
CP Gaji	-
UYHD	41,329,400.00
- Sisa UP 2017	41,329,400.00
<b>Jumlah</b>	<b>3,386,652,811.00</b>

### Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos untuk ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya : koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terinci sebagai berikut :

#### 1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal merupakan jumlah nilai saldo akhir di neraca tahun anggaran 2017. Pada tahun anggaran 2017 dan 2016 masing-

masing sebesar Rp. 2,147,341,960.98,- dan Rp. 2,149.347.412.98-

## **2. Surplus/Defisit - LO**

Merupakan beban operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 seperti beban pegawai, beban barang jasa, beban penyusutan dan beban lain-lain seperti belanja modal yang tidak dikapitalisir sebagai aset tetap dan Belanja Modal berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Kota Padang Panjang. Surplus/Defisit-LO tahun anggaran 2017 dan 2016 masing-masingnya adalah sebesar (Rp. 3,387,982,266.31,-) dan (Rp. 3,487,427,517.61,-)

## **3. Dampak Kebijakan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Dampak Kebijakan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada tahun anggaran 2017 dan 2016 masing-masingnya adalah sebesar Rp. 1,842,483.27,- dan Rp. 59,576,556.95,-

## **4. Dampak Kebijakan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Dampak Kebijakan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada tahun anggaran 2017 dan 2016 masing-masingnya adalah sebesar Rp. Rp. 230.000,- dan (Rp. 9,641,200.00)

## **5. Koreksi Aset Tetap (mutasi)**

Koreksi Aset Tetap pada tahun anggaran 2017 dan 2016 masingnya adalah sebesar (Rp. 26,921,428.57,-) dan Rp. 45,000,000.00)

## **6. Koreksi Aset Lainnya**

Koreksi aset lainnya pada tahun anggaran 2017 dan 2016 masing-masingnya adalah sebesar Rp. 9,411,200.00 dan 0,-.

## **7. Koreksi Persediaan**

Koreksi persediaan pada tahun anggaran 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000,0 dan 0,-

## **Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir pada tahun anggaran 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar (Rp. 1,256,048,050.63) dan (Rp. 1,451,414,019.02)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Pos Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 4.027.568.323,-, terealisasi sebesar Rp. 3.386.652.811,- atau 84,09% yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
2. Jumlah penerimaan transfer SP2D ( UP, GU, dan TU) adalah Rp. 3.427.982.211,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.386.652.811 (84,09%) sehingga tersisa UYHD sebesar Rp. 41.329.400,-. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 5 (lima) program dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang semuanya berjalan dengan baik, ditinjau dari segi keuangan maupun fisik.
3. Penyusunan laporan keuangan ini menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja serta menerapkan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana.